

Upaya Diplomasi Indonesia Dalam Mempertahankan Batur Bali sebagai Global Geoparks Network (UGGp)

by 07041382025181 Anita Pebby Kesuma

Submission date: 26-Apr-2024 09:46AM (UTC+0700)

Submission ID: 2362159927

File name: i_Sebagai_Global_Geoparks_Network_UGGp_-_ANITA_PEBBY_KESUMA.docx (173.4K)

Word count: 11957

Character count: 80298

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam mempertahankan Batur Bali sebagai bagian dari situs *Global Geoparks Network* (UGGp) dari revalidasi pertama tahun 2012-2016 dan revalidasi kedua tahun 2017-2020. UGGp bernaung di bawah nama UNESCO dengan tujuan mendorong, mengembangkan serta mempertahankan dan mempromosikan warisan budaya yang ada di Bali. UNESCO menjalankan program *geoparks* sejak tahun 1999. *Geoparks* menurut UNESCO bertujuan untuk menggali, mengambil, mengembangkan dan menghargai manfaat dari hubungan erat antara warisan alam dengan nilai-nilai dan sejarah yang terkandung di dalam warisan tersebut. Karena, situs-situs yang ada dan termasuk dalam *Global Geoparks Network* (UGGp) merupakan ikon Pariwisata Internasional.

Negara Indonesia adalah negara yang terbesar dalam hal kepuulauan dan terkenal dengan kekayaan sumber daya alam, keberagaman suku serta kebudayaannya. Warisan seni dan sejarah dan makna yang terkandung di dalamnya. Keberagaman suku dan budaya yang dimiliki Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, khususnya di pulau Bali. Bali adalah salah satu tujuan untuk berwisata, mulai dari wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara dipenjurunya. Hal ini membuat pemerintah, masyarakat Bali, dan pemangku kepentingan di sektor pariwisata harus bekerjasama dan berupaya meningkatkan mutu dan mengembangkan pariwisata yang ada di Bali. Karena hal ini juga berpotensi untuk mendorong korelasi kerjasama yang kuat dengan negara asing serta berperan penting dalam memajukan perekonomian sekaligus mempromosikan kekayaan destinasi wisata Indonesia ke luar negeri.

Pulau Bali atau yang dikenal dengan Pulau Dewata Bali menjadi kebanggaan Indonesia, karena dikenal dengan sikap multikulturalismenya yang dimana multikulturalisme adalah

kebijakan atau sikap yang menghargai dan mengakui adanya perbedaan agama, budaya, suku dan ras dalam suatu Masyarakat. Multikulturalisme di Bali dipengaruhi karena adanya perkembangan Pariwisata yang membawa banyak wisatawan lokal dan wisatawan asing ke pulau Dewata Bali, karena dikenal sebagai pulau yang memiliki destinasi wisata alam yang banyak dan indah sehingga dapat diminati oleh wisatawan lokal maupun luar negeri. Oleh sebab itu, Bali dipandang sebagai Provinsi kelas dunia, dengan Gunung Batur di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang menjadi salah satu daya tarik utama yang paling di minati oleh para wisatawan dan sudah di akui oleh UNESCO (Suatama, 2019).

Batur Bali adalah nama Gunung Api aktif yang ada di Pulau Dewata Bali, Batur Bali menjadi lambang dan kebanggaan dari Kecamatan Kintamani karena memiliki kaldera yang berukuran sangat besar hingga 13,8 x 10 kilometer. Gunung Batur memiliki ketinggian 1.267-2.152 Mdpl dan dikenal dengan Gunung tertinggi kedua di pulau Bali setelah Gunung Agung. Menurut para ahli Geologi, letusan besar dan sangat dahsyat pada 29.000 tahun dan 20.000 tahun yang lalu membuat Gunung Batur ini membentuk dua kaldera, yang disebut dengan kaldera pertama dan kaldera kedua. Karena adanya letusan yang dahsyat itu membuat Gunung Batur memiliki tiga kerucut Gunung api di tiap-tiap kawahnya, lalu kerucut-kerucut ini disebut dengan Batur I, Batur II, dan Batur III (Batur, 2021).

Kaldera I Gunung Batur membentuk kaldera II yang berada di bagian tenggara, kaldera II terdapat danau yang memiliki bentuk unik melingkar seperti bulan sabit dengan garis tengah berukuran kurang lebih 7 kilometer. Akibat letusan dari Gunung Batur yang membentuk danau vulkanik, danau dalam kaldera II disebut dengan Danau Batur karena bekas letusan Gunung Batur, sehingga nama daerah ini dikenal dengan sebutan "Batur Bali atau Gunung Batur" walaupun nama wilayahnya adalah Kintamani. Gunung Batur adalah salah satu yang paling besar dan indah di dunia karena menyajikan panorama tanah vulkanik yang luas dengan kaldera, kerucut, dan kawahnya. Pada tahun 2012 Gunung Batur ditetapkan dan diakui sebagai

Global Geopark Indonesia pertama oleh UNESCO karena memiliki keindahan alam, kawasan kaldera, peninggalan arkeologis dan geologinya, serta budaya masyarakat di sekitar (Ciputra, 2022).

United Nations Education, Scientific and Cultural Organization atau yang dikenal sebagai UNESCO adalah suatu organisasi internasional yang dibawah naungan PBB yang mengurus semua hal tentang pendidikan, sains, dan kebudayaan. Dalam hal ini fokus membahas tentang UNESCO dalam mengurus kebudayaan pariwisata *Global Geoparks Network* (UGGp) UNESCO yang menjalankan program UGGp di tahun 1999, dengan adanya inisiatif UNESCO tentang UGGp yang ditanggapi secara baik oleh banyak negara dengan meningkatkan fokus terhadap nilai dan situs warisan alam yang dimiliki oleh masing-masing negara. *Global Geoparks Network* (UGGp) akan memfasilitasi dan menyediakan kesempatan kerjasama untuk bertukar tenaga ahli dalam penelitian tentang warisan situs geologi (UNESCO, UNESCO Global Geoparks, 2021). Dengan melalui UGGp yang dimana nantinya warisan geologi itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu lingkungan yang relevan di wilayah mereka, dengan tujuan mendorong penghargaan dan perlindungan lebih lanjut terhadap warisan budaya tersebut (Hartati, Purwanto, Sugiarto, & Ali, 2021).

Geopark Batur Bali ditetapkan oleh UNESCO sebagai bagian dari *Global Geoparks Network* (UGGp) pada tahun 2012. Penetapan tersebut dilakukan di Portugal tanggal 20 September 2012 pada saat konferensi *Geoparks* Eropa yang ke-1. *Geoparks* adalah kependekan dari *Geological Park* yang dalam Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai Taman Geologi atau Taman Bumi. Tujuan awal pendirian *Geoparks* adalah untuk melindungi warisan geologi di negara-negara Eropa, ide ini dimulai oleh organisasi non-pemerintah yang bernama *Europe Global Network* (EGN) pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2004 lebih dikembangkan lagi oleh UNESCO menjadi *Global Geoparks Network* (UGGp) yang bertujuan untuk dapat menampung anggota di berbagai belahan dunia. Menurut UNESCO, *Geoparks* merupakan area

yang dikenal karena memiliki keunggulan geologi dan pembangunan ekonomi secara mapan melalui pemanfaatan warisan geologi atau aktivitas geoturisme (Pengetahuan, 2019). *Geoparks* Indonesia adalah Kawasan dengan pemandangan yang indah yang memiliki peran penting dalam warisan keanekaragaman budaya dan letak geologisnya. Sejak Batur Bali ditetapkan sebagai *geoparks* pada tahun 2012, kegiatan geowisata dan fasilitas penunjang di Batur Bali terus berkembang (Prastyadewi & Saitri, 2021).

Upaya yang dilakukan Pemerintah sesuai dengan PP No 50 Tahun 2011 mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, yang menjadi landasan kebijakan terkait pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata di Indonesia (Bangun & Junita, 2020). Kepariwisata menurut peraturan pemerintah adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan pariwisata dan bersifat multidisiplin serta multidimensi terhadap interaksi tiap negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan wisatawan lokal maupun wisatawan luar negeri (Database Peraturan, 2011). Terkhusus upaya Pemerintah Bali yaitu Wayan Koster selaku Gubernur Bali yang berkewajiban untuk mengelola serta mengembangkan pariwisata yang ada di Bali yaitu *geoparks* Batur Bali. Proses revalidasi pertama pada Agustus 2016 bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari pengelolaan *geoparks* Batur Bali sebagai UGGp. Wayan Koster selaku Gubernur Bali melakukan revalidasi kedua bersama tim Assessor dari UNESCO pada tanggal 16 Juli 2022 untuk mempertahankan kawasan Batur, Kabupaten Bangli, Kecamatan Kintamani, sebagai UGGp. Harusnya Revalidasi *geoparks* kedua ini dilaksanakan pada tahun 2020, akan tetapi kegiatan revalidasi ini menjadi terhambat karena Pandemi COVID-19 (Lazuardi & Salim, 2022). Hasil dari penilaian UNESCO terhadap upaya pemerintah Bali dalam mempertahankan serta menjaga dan melindungi Kawasan Batur semakin kuat, sehingga Gubernur Bali berkomitmen penuh untuk melaksanakan arahan kebijakan dari UNESCO agar dapat mengelola serta mengembangkan Kawasan *Geoparks* Batur dengan Baik. Dalam proses revalidasi tersebut Gubernur Bali

menugaskan Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta untuk merencanakan masterplan *Geopark* Batur dengan dilakukannya pendekatan secara hati-hati serta lebih menekankan pada konsep pelestarian dari Gunung Batur, Danau Batur, adat istiadat, dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bangli Kecamatan Kintamani (Muliantari & Santoso, 2022).

Revalidasi ini dilakukan 4 tahun sekali oleh UNESCO untuk melihat perkembangan serta melihat upaya pemerintah dan masyarakat Bali dalam menjaga, memperkuat dan mempertahankan wilayah Batur sebagai peninggalan budaya yang bersejarah dari generasi ke generasi. Upaya ini berhubungan dengan visi Pemerintah Provinsi Bali yang dikenal sebagai “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang berarti menjaga dan melindungi keseimbangan keharmonisan alam Bali serta segala isinya. Hal ini bertujuan agar kehidupan masyarakat di Pulau Dewata Bali dapat terwujud secara harmonis dengan manusia, alam dan kekayaan budayanya.

Upaya Masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata *geoparks* Batur Bali sangat berperan besar, sehingga masyarakat harus melaksanakan pembinaan, pelatihan serta pengetahuan yang lebih mendalam mengenai *geoparks* dan kepariwisataan tersebut. Sebagai Masyarakat Kintamani yang memiliki UGGp Batur Bali harus mendukung secara penuh untuk melaksanakan konservasi Kawasan Kintamani sebagai Kawasan wisata *geoparks* Batur Bali. Sehingga, dengan adanya upaya dan campur tangan dari Masyarakat lokal dapat meningkatkan ekonomi lokal secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan kegiatan geowisata dan fasilitas penunjang di Batur Bali agar dapat terus berkembang (Wiramatika, Sunarta, & Ancom, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks yang telah di uraikan sebelumnya, supaya pariwisata *Geoparks* Batur Bali dapat terus berkembang, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari

penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam mempertahankan Batur Bali sebagai UNESCO *Global Geoparks Network* (UGGp)?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami upaya diplomasi Indonesia dalam mempertahankan Batur Bali sebagai UNESCO *Global Geoparks Network* (UGGp).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penulis berharap kedepannya penelitian ini dapat berguna sebagai referensi bagi peneliti-peneliti yang akan datang, serta memberikan pemahaman bagi kajian Studi Ilmu Hubungan Internasional baik dari konsep yang digunakan maupun studi kasus dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Harapan penulis, penelitian ini kedepannya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait peran dan tanggungjawab dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini membantu penulis dalam menemukan landasan teori dan konsep yang dimana guna dapat memecahkan permasalahan serta berguna untuk membandingkan tulisan penulis dengan tulisan terdahulu.

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

| No. | Litelatur | Keterangan |
|-----|--------------------|--|
| 1. | Nama Penulis : | Deona Fhenta Amelia, Saiman Pakpahan |
| | Judul : | Upaya Pemerintah Indonesia Menjadikan Kawasan Gunung Sewu sebagai UNESCO <i>Global Geoparks Network</i> (UGGp) |
| | Sumber Literatur : | JOM FISIP UNRI VOL.3 NO.2 (1-12) |
| | Tahun : | 2016 |
| | Hasil : | Disebutkan bahwa, proses menjadikan Kawasan Gunung Sewu sudah dilakukan sejak tahun 2013. Dengan cara, pemerintah Indonesia melakukan pengiriman dokumen-dokumen kepada pihak UGGp. Akan tetapi dalam proses menjadikan Gunung Sewu sebagai salah satu bagian dari UGGp pemerintah Indonesia telah menerima penolakan sebanyak 2x karena belum dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh UGGp, yang pertama dalam forum konferensi UGGp di Korsel 2013, yang kedua pada tahun 2014. Maret 2015, pemerintah Indonesia kembali mengirimkan dokumen-dokumen dengan pihak UGGp. September 2015 akhirnya Kawasan Gunung Sewu telah Resmi menjadi salah satu bagian dari <i>Global Geoparks Network</i> . |

| | | |
|----|--------------------|--|
| | Perbandingan : | Dalam penelitian terdahulu, penulis berfokus tentang bagaimana upaya pemerintah Indonesia mendapatkan pengakuan dari <i>Global Geoparks Network</i> UNESCO untuk menjadikan Kawasan Gunung Sewu sebagai salah satu bagian UGGp. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus tentang bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam mempertahankan Batur Bali sebagai UNESCO <i>Global Geoparks Network</i> . |
| 2. | Nama Penulis : | Indriani Rahmasari, Putri parameswari |
| | Judul : | Strategi Pemerintah Indonesia Untuk Memperoleh Pengakuan UNESCO sebagai UNESCO <i>Global Geoparks</i> Studi Kasus: Kawasan Gunung Rinjani 2013-2018 |
| | Sumber Literatur : | JOM FISIP BUDI LUHUR VOL.4 NO.2 (184-192) |
| | Tahun : | 2020 |
| | Hasil : | Kawasan Gunung Rinjani telah melakukan beberapa tahapan yang diupayakan dari tahun 2016 dan sempat ditangguhkan pada tahun 2017 karena belum dapat memenuhi 1 dari 10 syarat yang telah ditetapkan oleh UNESCO untuk menjadi bagian dari GGN. 1-10 area dalam UNESCO <i>Global Geoparks</i> yaitu: <i>natural resources, science, culture, geological hazard, women, sustainable development, local and indigenous knowledge, climate change, education, and geoconservation</i> . Akan tetapi berakhir pada tahun 2018 Geopark Rinjani berhasil mendapatkan pengakuan dari UNESCO Sebagai UNESCO <i>Global Geoparks</i> . |
| | Perbandingan : | Dalam penelitian terdahulu, penulis menggunakan teori Organisasi Internasional (UNESCO). Sedangkan di penelitian ini, penulis menggunakan teori <i>Multy Track Diplomacy</i> yang dimana aktor dalam Hubungan Internasional |

| | | |
|----|--------------------|---|
| | | tidak hanya dilakukan oleh presiden, menteri luar negeri, duta besar, dan representasi lainnya. Akan tetapi dapat juga dilakukan oleh aktor-aktor selain negara (<i>non-state actor</i>). |
| 3. | Nama Penulis : | Matus Bangun, Dwiroso Junita |
| | Judul : | Strategi Pengembangan Kawasan Geosite Kaldera Toba Pasca Penetapan Sebagai UNESCO <i>Global Geoparks</i> |
| | Sumber Literatur : | Sociae Polites VOL.22 NO.2 (173-186) |
| | Tahun : | 2020 |
| | Hasil : | Pada tanggal 4 Juli berbagai negara dari anggota UNESCO menghadiri rapat sidang di Paris, menyatakan bahwa kaldera Toba ditetapkan sebagai UNESCO <i>Global Geoparks</i> . Sehingga, menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mempertahankan akan divalidasi dan dievaluasi setiap 4 tahun sekali. Maka dari itu melalui kementerian, pemerintah pariwisata menjelaskan mengenai pengembangan dari kawasan Danau Toba yang akan didasari oleh 3 Faktor utama yaitu: 1 Atraksi, yang dimana melakukan pertunjukan budaya lokal untuk mengacu pada standar kualifikasi sertifikasi UGGp. 2. Aksesibilitas, alat transportasi serta saran pendukungnya. 3. amenitas, fasilitas pariwisata seperti toko oleh-oleh, rumah makan, taman dan lain-lain. |
| | Perbandingan : | Dalam penelitian terdahulu menyebutkan bahwa pengembangan Kawasan Danau Toba didasari dengan 3 faktor yaitu: atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis kebijakan yang menjadi faktor penghambat seperti: rendahnya anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, rendahnya informasi teknologi, dan kurangnya motor penggerak industri pariwisata. |

| | | |
|----|------------------|--|
| 4. | Nama Penulis | : Indah Syafriani |
| | Judul | : Peran Komisi nasional Indonesia Untuk UNESCO (KNIU) Dalam Pengembangan Ekowisata UNESCO <i>Global Geoparks</i> Ciletuh-Palabuhanratu. |
| | Sumber Literatur | : Thesis (Skripsi) Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pasundan |
| | Tahun | : 2019 |
| | Hasil | : Ditahun 2018, tepatnya pada tanggal 12 April. <i>Geoparks</i> Ciletuh-Palabuhanratu resmi ditetapkan sebagai UNESCO <i>Global Geoparks</i> melalui sidang badan eksekutif UNESCO ke-204. karena memiliki keindahan alam yang lengkap, seperti gunung, air terjun, landscape, sawah, ladang, dan berujung di muara sungai. Dengan memiliki keindahan alam yang lengkap, kemudian UNESCO melakukan penilaian tentang Ciletuh-Palabuhanratu sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh UNESCO, dan UNESCO memberikan pemahaman tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat seperti menggunakan SDA secara berkelanjutan. |
| | Perbandingan | : Dalam penelitian terdahulu, peneliti menjelaskan bahwa geopark ciletuh ini memiliki luas 126.000 hektar yang memiliki 3 situs warisan alam yang tersebar. Sedangkan pada penelitian ini Geopark Batur memiliki 21 situs warisan alam yang tersebar. |
| 5. | Nama Penulis | : Leonard Felix Huabarat, Nuning Indah Pratiwi |
| | Judul | : Pengembangan Pariwisata Natuna Menuju UNESCO <i>Global Geoparks</i> |
| | Sumber Literatur | : Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial VOL.6 NO.1 (1-9) |

| | | |
|--------------|---|--|
| Tahun | : | 2022 |
| Hasil | : | Dalam upaya mengembangkan <i>Geoparks</i> Nasional Natuna menuju UNESCO <i>Global Geoparks</i> dengan melakukan strategi prioritas berdasarkan proses untuk menyiapkan master plan bagi BP <i>Geoparks</i> Nasional Natuna menuju UNESCO <i>Global Geoparks</i> yang telah dilakukan oleh <i>Geoparks</i> Nasional Natuna dengan mengangkat segala potensi di berbagai sudut untuk mengoptimalkan peningkatan aksesibilitas ke kawasan <i>Geoparks</i> Nasional Natuna, dengan dukungan transportasi dan dengan adanya pembangunan infrastruktur <i>Geoparks</i> nasional Natuna akan dapat mengembangkan <i>Geoparks</i> Nasional Natuna menuju UNESCO <i>Global Geoparks</i> . |
| Perbandingan | : | Dalam penelitian terdahulu, peneliti menjelaskan bahwa lebih mengoptimalkan peningkatan aksesibilitas dan pembangunan infrastruktur untuk mengembangkan <i>Geoparks</i> Nasional Natuna menuju UNESCO <i>Global Geoparks</i> . Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam mempertahankan Batur Bali sebagai <i>Global Geoparks Network</i> , strategi Diplomasi Indonesia lebih berfokus pada pengembangan masyarakat untuk dapat menjaga kelestarian yang ada di Batur Bali. |

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Multi Track Diplomacy

Multi Track Diplomacy (MTD) adalah istilah dari kerangka konseptual yang telah didesain sedemikian rupa untuk merancang aktifitas dengan tujuan mewujudkan perdamaian. Dalam studi Hubungan Internasional, beberapa peneliti baru berpendapat bahwa partisipasi aktor terbatas pada presiden, duta besar dan menteri luar negeri dan perwakilan resmi negara lain. Akan tetapi, faktanya, aktor didalam Hubungan Internasional sangatlah beragam. Melihat dari ilmu publik aktor dari Hubungan Internasional yang mengalami perubahan pada tahun 1989 dalam menjelang runtuhnya Tembok Berlin yang menandai akhir dari perang dingin, dalam kelompok global mereka percaya bahwa upaya damai tidak harus melalui negara akan tetapi dapat juga dengan melalui aktor non-negara. Maka dari itu, munculnya aktor-aktor dalam MTD merupakan perluasan dari *track one*, yakni negara. Kemudian muncul kerangka kerja konseptual yang bertujuan menciptakan perdamaian dengan cara mencerminkan tindakan yang dimana disebut sebagai *Multi Track Diplomasi* (MTD) (Alexandra & K. Mujiono, 2019).

Menurut para akademisi HI dengan timbulnya MTD adalah karena kurangnya peran *track one* untuk mewujudkan perdamaian. Melihat peristiwa Runtuhnya Tembok Berlin dan perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, menjadi jelas bahwa peran dari pemerintah saja tidak cukup untuk mencapai perdamaian yang diinginkan oleh masyarakat global. Oleh karena itu, lahir konsep MTD sebagai upaya awal untuk mencapai perdamaian (Alexandra & K. Mujiono, 2019).

Dr. Louise Diamond dan John McDonald berpendapat bahwa *multi-track diplomacy* memiliki sembilan track yaitu:

1. *Track One*: adalah *Government* atau pemerintah merupakan upaya dari resolusi konflik yang dilakukan melalui alur formal oleh pemerintah dan lembaga-

lembaga yang berkepentingan pada suatu negara, dengan tujuan yang jelas yaitu untuk mewujudkan kepentingan nasional yang dimiliki oleh suatu negara. sektor yang termasuk dalam kepentingan nasional diantaranya adalah: politik, ekonomi, HAM, bantuan kemanusiaan, perdagangan nasional, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan kontrol senjata.

2. *Track Two*: adalah *non-government* yang melakukan upaya untuk mewujudkan resolusi konflik di kalangan non-pemerintah yang bersifat penyelesaian untuk mewujudkan kondisi yang damai. *track two* justru menggunakan cara yang non-formal dengan menggunakan komunikasi untuk membangun kepercayaan dan pemahaman mutual, yang bertujuan untuk dapat menyelesaikan masalah bersama-sama. Oleh karena itu *track two* hadir dengan sifat non-formalnya dalam menyelesaikan masalah yang ada. Aktor yang terlibat didalam *track two* memiliki keragaman yang signifikan, karena pendekatan ini memberikan kesempatan yang luas bagi setiap anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam usaha mewujudkan perdamaian.
3. *Track Three*: adalah *Business* atau perdamaian sebagai jalan menuju perdamaian, *track three* menekankan pada upaya memajukan pembangunan ekonomi masyarakat, memfasilitasi komunikasi antar masyarakat, dan berkolaborasi dalam mewujudkan perdamaian. Oleh karena itu, *track three* menjadi elemen krusial dalam mencapai perdamaian global dengan memastikan kesejahteraan bagi masyarakat.
4. *Track Four*: adalah *Private Citizen* atau perdamaian melalui keterkaitan antara individu/personal atau warga negara biasa/swasta. Kemampuan dari *private citizen* dalam menyelesaikan masalah yaitu melalui jalur *grass roots* untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.

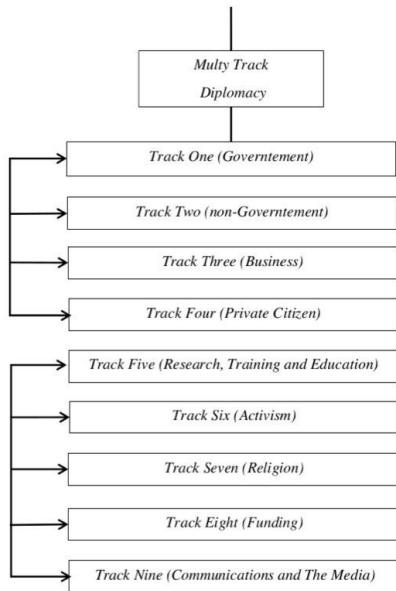
5. *Track Five*: adalah *Research, Training and Education* atau keterlibatan yang sangat erat antar aktor dengan kalangan peneliti dan akademisi. *Track five* bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya perdamaian, serta berupaya dalam mewujudkan perdamaian secara luas dan berkelanjutan melalui *peace making and resolution conflict*. Ada dua faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam *track five* yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merujuk pada para pemimpin dalam lingkungan pembuatan kebijakan, sementara faktor eksternal melibatkan masyarakat dan ahli akademis, yang berperan sebagai penasihat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan tersebut.
6. *Track Six*: adalah *Activism* yang merupakan kelompok aktivis atau *peace building* melalui advokasi (publik). Kata aktivis dalam KKBI mengacu pada individu (anggota organisasi politik, sosial, pemuda, mahasiswa, buruh, petani, wanita) yang secara aktif terlibat dalam mendorong pelaksanaan kegiatan organisasi. *Track six* memiliki perspektif yang serupa dengan *track four* dalam hal kegiatan yang melibatkan warga biasa (*private citizen*), yang mereka meyakini bahwa akar rumput (*grass roots*) didalam masyarakat adalah kunci untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara efektif, sehingga solusi-solusi tersebut dapat berhasil dan mengarahkan masyarakat menuju kesuksesan.
7. *Track Seven*: adalah *Religious* atau perdamaian dalam bentuk kepercayaan pada perbuatan yang benar. Agama disebut sebagai interaksi manusia yang berpacu pada perasaan yang mereka yakini menurut Drajat. Agama memegang peranan yang sangat krusial dalam kehidupan manusia sebagai sebuah system yang mengatur kehidupan manusia di dunia dan menjadi pondasi bagi eksistensi manusia.

8. *Track Eight*: adalah *Funding* atau kelompok penyedia dana, sering disebut sebagai kelompok yang memiliki kekayaan yang signifikan dan memiliki komitmen aktif untuk mendukung perdamaian melalui sponsor. Contoh kelompok yang aktif dan terlibat secara rutin adalah filantropis, kelompok ini berkontribusi dengan dana untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk perdamaian. *Track eight funding* dibedakan menjadi dua kelompok yaitu kelompok dengan pendanaan besar dan kelompok dengan pendanaan kecil. Pendanaan besar termasuk Pew Charitable trust, MacArthur Foundation, Djarum Foundation, dan Yayasan Bina usaha Lingkungan (YABUL). kelompok pendanaan kecil contohnya seperti Tides Foundation, dan beberapa organisasi lainnya, mereka lebih berfokus pada bantuan untuk aksi kelompok aktivis dalam memperjuangkan misi yang mereka miliki.
9. *Track Nine*: adalah *Communications and The Media* atau perdamaian yang melibatkan media informasi atau media massa dan komunikasi. Peran media sangat signifikan dalam membentuk perilaku, pemikiran, dan keputusan masyarakat terhadap isu-isu yang sedang beredar. Melalui perannya, media menjadi salah satu actor global yang memiliki pengaruh dan cakupan yang mencapai tingkat global, terutama dengan adanya media asing yang mampu memengaruhi kebijakan negara dalam menanggapi isu-isu yang sedang berkembang.

2.3 Kerangka Pemikiran

Tabel 2.3 Kerangka Pemikiran

| |
|---|
| Upaya Diplomasi Indonesia Dalam Mempertahankan Batur Bali Sebagai UNESCO <i>Global Geoparks Network</i> (UGGp) |
|---|



Sumber: Olahan Penulis

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, Hipotesis penelitian yang penulis ajukan adalah upaya diplomasi Indonesia dalam mempertahankan Batur Bali sebagai UNESCO *Global Geoparks Network* (UGGp) untuk mencapai kepentingan pemerintah dan masyarakat bali dalam melakukan diplomasi pariwisata. Dengan adanya dukungan dan campur tangan UNESCO yang menjadi wadah untuk Batur Bali

lebih dikenal oleh dunia, Pemerintah kota dan masyarakat setempat haruslah melakukan upaya-upaya yang dapat mempertahankan serta membangun citra baik melalui diplomasi pariwisata.

BAB IV

SEJARAH DAN GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Batur Bali

Pada masa lalu, pulau Bali hanya memiliki empat gunung, yakni Gunung Kari di barat, Gunung Lempuyang di timur, Gunung Beratan di utara, dan Gunung Andakasa di selatan. Namun, keempat gunung tersebut tidak cukup untuk menjaga pulau Bali tetap di tempatnya, sehingga pulau tersebut masih mengapung dan belum stabil di atas samudera luas. Gahulu, masyarakat Bali mempercayai bahwa Gunung Semeru adalah pura utama, dan para dewa mengutus Dewa Naga Besukih, Dewa Naga Tatsaka, Dewa Benawang Nala, dan Dewa Ananta Boga untuk mengikat, menyangga, dan memindahkan puncak Gunung Semeru ke pulau Bali. Setelah tiba di pulau Bali, puncak Gunung Semeru dibagi menjadi dua, menjadi Gunung Agung dan Gunung Batur. Setelah kedua gunung ini ditempatkan di Bali oleh para dewa, masyarakat percaya bahwa keduanya menjadi tempat tinggal dewa penguasa alam raya (Parahayang Purudua Peredana), dan keyakinan masyarakat Bali tidak lagi goyah karena mereka telah diikat oleh Gunung Agung dan Gunung Batur (sejarah.bali.com, 2019).

Gunung Batur Bali merupakan gunung api aktif yang terletak di Pulau Dewata Bali, khususnya di wilayah Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Gunung Batur merupakan gunung api terbesar kedua di pulau Bali setelah Gunung Agung. Batur Bali menjadi lambang atau kebanggaan dari Kecamatan Kintamani karena memiliki kaldera yang indah yang memiliki ketinggian 1267-2152 Mdpl. Gunung Batur ini meletus pertama kali di tahun 1804 dan pada letusan ini terbentuk kawah utama di bagian puncak, 17 tahun kemudian pada tahun 1821 terjadi letusan kedua dari kawah yang sama. Pada tahun 1984, terjadi letusan dari kawah utama Gunung Batur yang menghasilkan aliran lava ke arah selatan mencapai tepi danau. Tahun 1888, letusan keempat juga menghasilkan lava yang mengalir ke arah tenggara menuju tepi danau Batur. Kemudian, pada tahun 1905, terjadi letusan kembali dari tiga titik yang

berbeda, membentuk tiga kawah baru yang dikenal sebagai Kawah Batur I, II dan III. Antara periode 1994-2003 Gunung Batur meletus 5 kali, letusan berikutnya terjadi di tahun 1997- kemudian letusan terakhir di tahun 2000, setelah itu Gunung Batur meletus beberapa kali dengan periode letusan yang berlangsung sekitar 1 bulan yang menyebabkan terbentuknya dua kawah baru pada tahun 1998. Sejak tahun 1804 - 2005 Gunung Batur telah meletus lebih dari 22 kali dan letusan yang terbesar dari Gunung Batur ini tepat di tanggal 2 Agustus dan 21 September tahun 1926. Hasil dari penelitian tercatat sebanyak kurang lebih 26 kali letusan dari Gunung Batur (Giri Putra & Suyasa, 2017)

Batur Purba sebelumnya merujuk pada Batur Bali, akibat dari letusan dahsyat 29.000 tahun yang lalu. Letusan tersebut menyebabkan sebagian besar kerucut Batur Purba menghilang dan membentuk kaldera, sehingga akibat letusan yang dahsyat itu menimbulkan Gunung api baru yang sekarang dikenal dengan Batur Bali atau Gunung Batur. Gunung Batur ini terbentuk menjadi dua kaldera yaitu kaldera luar dan kaldera dalam, kaldera luar (kaldera I) berbentuk elips barat-tenggara dengan luas 13,8 km X 10 km, sedangkan kaldera dalam (kaldera II) berbentuk melingkar dalam bagian tenggara dengan garis tengah kurang lebih 7 kilometer, yang terdapat danau Batur melingkar seperti bulan sabit dengan panjang 7,5 km dan lebar 2,5 km akibat letusan dari gunung Batur yang membentuk danau vulkanik, danau dalam kaldera II dikenal dengan sebutan Danau Batur. Terbentuknya danau kaldera adalah akibat amblasan dan letusan dahsyat serta destruktif yang menghasilkan sejumlah besar batu api di 29.000 dan 20.150 tahun yang lalu yang dianggap memiliki signifikansi internasional. Kaldera, danau, kawah, batuan vulkanik dengan morfologi vulkanik kecil, kerucut pasir, kerucut cinder adalah komponen gunung api yang dilindungi. Keputusan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Konservasi Geologi UGGP Batur yaitu untuk melindungi seluruh situs geologi yang ditetapkan (Pramatha, 2022).

Pada masa lampau ada 5 tahapan yang terjadi dalam letusan Gunung Batur. Tahap-I adalah tahap pertama pembangunan Batur Tahap-II adalah tahap dimana penghancuran pertama, Tahap-III merupakan tahap konstruksi kedua (misalnya Gunung Abang), Tahap-IV merupakan tahap penghancuran kedua, dan Tahap-V adalah tahap konstruksi ketiga. Luas permukaan UGG Batur tidak mengalami perubahan sejak pertama kali ditetapkan sebagai Geopark Batur yang dimana luasnya adalah 366,4 km persegi.

Gunung Batur merupakan salah satu gunung yang paling besar dan terindah di dunia yang menampilkan panorama vulkanik lengkap dengan dinding kaldera, kerucut, dan kawah. Gunung Batur ditetapkan dan diakui sebagai Geopark Global Indonesia pertama oleh UNESCO karena memiliki keindahan alam Kawasan Kaldera, jejak arkeologi dan geologinya, serta kekhasan budaya masyarakat di sekitar. Penetapan Kaldera Batur sebagai bagian dari jaringan UNESCO *Global Geoparks Network* (UGGp) pada tanggal 20 september 2012 didasari pada potensi kawasan batur yang mencakup warisan geologi, Kaldera Batur, 15 Desa pendukung yang jelas terbatas dengan keunikan yang beragam, dan komponen biodiversity Batur yang khas (Nasional, 2017).

4.2 Taman Bumi (Geoparks)

¹, *Division of Earth Sciences*, UNESCO telah melakukan studi awal mengenai Program Pembangunan UNESCO Geoparks pada awal tahun 2000, akan tetapi program ini tidak disepakati oleh Lembaga Eksekutif UNESCO. Sebaliknya, lembaga tersebut hanya menyepakati bantuan kesadaran dari UNESCO terhadap pembangunan *geoparks* secara global. ² Kegagalan UNESCO dalam mewujudkan program khusus untuk pembangunan *geoparks* pada waktu itu memicu semangat di Eropa untuk membentuk jaringan *geoparks* mereka tersendiri. Pada juni tahun 2000, empat wilayah di Eropa yang mendukung kegiatan EGN yaitu *Reserve Geologique de Haute-Provence* (Prancis), *Maestrazgo Cultural Park* (Spanyol), *Vulkaniefel*

(Jerman), dan *Lesvos Petrified Forest* (Greece) ke-4 wilayah ini mempromosikan pemeliharaan geologi dan pembangunan lestari yang telah mewujudkan *European Geoparks Network* (EGN). Pada april 2001 EGN telah menandatangani perjanjian dengan *Division of Earth Sciences*, UNESCO untuk bernaung di bawah nasihat UNESCO (Henriques & Brihla, 2017). Tujuan pendirian EGN adalah untuk memberikan peluang kepada ahli *geoparks* untuk berkolaaborasi, berbagi informasi, dan pengetahuan, sekaligus mengembangkan strategi dan pendekatan dalam pembangunan *geoparks*. keempat wilayah di Eropa tersebut merupakan empat *geoparks* pertama di dunia, sementara EGN merupakan jaringan *geoparks* internasional pertama yang dibentuk. Sejak saat itu, EGN telah mengalami pertumbuhan yang pesat, dengan wilayah dari negara-negara Eropa lain yang bergabung setia tahun. UNESCO juga telah memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok untuk memperkuat EGN (Zouros, 2005).

Pada Februari 2004 di Paris, sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Lembaga Saintifik *Internasional Geoscience Programme UNESCO*, *International Union of Geological Science*, *International Geographical Union* dan sejumlah ahli internasional membahas tentang pelestarian warisan geologi. Mereka setuju untuk mengembangkan 'Global Networks of National Geoparks' atau yang dikenal sebagai *Global Geoparks Network* (UGGp) di bawah naung UNESCO. Sejalan dengan pendirian UGGp, Badan Penasihat *Geoparks* dibentuk untuk merekomendasikan 25 *geoparks* dari Eropa dan China sebagai *geoparks* nasional yang diakui sebagai anggota pendiri UGGp (Azman, Komoo, Halim, & Amir, 2010).

Pengumuman mengenai anggota pendiri UGGp diumumkan setelah diselenggarakannya *First International Conference on Geoparks* yang telah diadakan di Beijing, China pada Juni 2004. Sejak saat itu, pembangunan UGGp dikelola oleh Biro UGGp yang didirikan di bawah pengawasan *Division of Ecological and Earth Science*, UNESCO. Pada tahun 2005, melalui *Madonie Declaration*, anggota EGN secara otomatis diakui sebagai anggota UGGp, dan semua peraturan serta panduan UGGp perlu di sahkan oleh EGN. Anggota

UGGp terus bertambah, dan hingga tahun 2010, jumlah *geoparks* yang menjadi anggota telah mencapai 58, mewakili 20 negara.

Konsep *geoparks* telah dibangun berdasarkan ide ⁵keperluan untuk mengintegrasikan usaha pemeliharaan sumber warisan dengan pembangunan sumber untuk meningkatkan ekonomi penduduk setempat. Berdasarkan ide ini, *geoparks* menurut UNESCO memberikan tumpuan kepada pemerintah dan masyarakat untuk memperkenalkan, memelihara, dan meningkatkan kekayaan warisan geologi kepada seluruh masyarakat dunia. *Geoparks* dapat dijadikan sebagai alat pembangunan untuk memperkenalkan kepentingan hubungan manusia dan geologi. Konsep *geoparks* memperkuat tuntutan ⁶ untuk mengintegrasikan antara sains dan budaya, sambil menghormati keunikan yang hadir pada suatu *landscape* keindahan alam (Komoo, 2010)

Geoparks adalah wilayah yang mempunyai signifikansi sebagai peninggalan geologis yang perlu dilestarikan sekaligus sebagai tempat untuk mengembangkan strategi ekonomi berkelanjutan melalui manajemen yang baik dan realistis. *Geoparks* memberikan kesempatan bagi pembangunan lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal dalam hal memperoleh keuntungan ekonomi secara nyata dengan melalui kegiatan pariwisata yang berkelanjutan. Di dalam *Geoparks*, berbagai objek pengetahuan geologi bersatu dengan masyarakat umum, sementara unsur geologi dan bentang alam yang berhubungan terkait aspek lingkungan dan budaya. *Geoparks*-pun dapat dipahami melalui beberapa aspek seperti berikut (Nurjani, 2021):

1. Sebagai suatu kawasan yang berbatasan dengan elemen geologi yang memiliki makna dan batasan yang tegas dan nyata, serta cukup luas untuk pengembangannya;
2. Sebagai sarana untuk mengenali warisan bumi melalui sejumlah situs geologi yang memiliki nilai ilmiah, keunikan, keindahan, dan edukasi;
3. Sebagai wilayah yang melindungi warisan bumi dan mempertahankan keberadaannya serta kelestariannya;

4. Sebagai destinasi untuk pengembangan geowisata, menciptakan nilai ekonomi melalui pariwisata alam yang berkelanjutan;
5. Sebagai platform untuk kerjasama yang efektif dengan masyarakat lokal dan menghubungkan nilai-nilai warisan bumi;
6. Sebagai tempat implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk uji coba metode perlindungan lingkungan dan penelitian ilmiah yang beragam.

Perkembangan *geoparks* di Indonesia saat ini menarik perhatian semua pihak. Dengan penerimaan yang luas dari masyarakat. Meskipun ada beberapa penolakan yang mungkin terjadi, biasanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang peran *geoparks* dan kekhawatiran terkait dengan pengaruh terhadap mata pencaharian. Secara umum, keberadaan *geoparks* umumnya diterima secara positif, secara social dan berdampak baik untuk ekonomi lokal (Wendita, 2019). Dengan potensi geologi, kenekaragaman hayati, dan budaya yang besar, masih terbuka peluang besar bagi *geoparks* di Indonesia untuk tumbuh lebih cepat dan lebih luas, sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah *geoparks* dunia yang memiliki nilai ekonomi dan menjunjung tinggi prinsip konservasi (Lestari & Indrayati, 2022).

Geoparks berperan sebagai fasilitas Pendidikan di bidang geologi dan sebagai area konservasi. Program *Geoparks* Global UNESCO memiliki masa berlaku empat tahun, setelah itu kualitas dan fungsi UGGp diperiksa ulang secara menyeluruh selama proses revalidasi (UNESCO). Gunung Batur dianggap memenuhi persyaratan tersebut, sehingga UNESCO menetapkannya sebagai *geoparks*. Karena karakteristiknya yang unik dan sejarahnya yang berlangsung selama berabad-abad, Batur Bali telah diakui sebagai salah satu *geoparks* di dunia oleh UNESCO, dengan penetapannya yang pada bulan September 2012 di Portugal (Suarning, 2019).

⁴ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menetapkan *geoparks* nasional berdasarkan usulan dari pemimpin pemerintah daerah setempat (Gubernur), sedangkan UNESCO menetapkan UGGp berdasarkan rekomendasi dari Komite Nasional Geoparks Indonesia (KNGI) setelah wilayah tertentu dinyatakan sebagai *geoparks* nasional paling tidak satu tahun (Muslim, et.al., 2022). ⁴ ada enam taman bumi global atau *global geoparks* yang diakui oleh UNESCO, yaitu:

1. Geopark Batur di Provinsi Bali,
2. Geopark Gunung Rinjani di Provinsi NTB,
3. Geopark Gunung Sewu di Provinsi DIY,
4. Geopark Ciletuh di Provinsi Jawa Barat,
5. Geopark Kaldera Toba di Sumatera Utara, dan
6. Geopark Belitong di Provinsi Bangka Belitung.
7. Geoparks Maros Pangkep di Provinsi Sulawesi Selatan,
8. Geopark Ijen di Provinsi Jawa Timur,
9. Geopark Merangin di Provinsi Jambi, dan
10. Geopark Raja Ampat di Provinsi Papua.

⁴ Cepatnya pertumbuhan *geoparks* ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kerja sama internasional. Sebagai contoh, kerja sama antara Jerman dan negara-negara di Eropa lainnya dalam pengembangan geosains dan pariwisata yang telah menghasilkan hasil yang positif dalam penerapannya.

Ada tiga pilar utama dalam pengembangan *geoparks*, yang mencakup fungsi sebagai area konservasi, Pendidikan, dan pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Rohaendi, 2023):

1. Sebagai area konservasi, *geoparks* diharapkan dapat berperan dalam pelestarian geologi, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya, yang dikenal sebagai konsep ABC;
2. Dasar pengembangan *geoparks* sebagai tujuan pariwisata sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2019 tentang pengembangan taman bumi (*geoparks*);
3. Pengembangan *geoparks* sebagai tujuan pariwisata tidak hanya bertujuan untuk mendorong pelestarian keanekaragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan wilayah melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Rencana Induk *Geoparks* digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan *geoparks* sebagai tujuan pariwisata.

4.3 Profil UNESCO

UNESCO merupakan Organisasi Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UNESCO berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan dengan mendorong kerjasama Internasional dibidang ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, komunikasi, dan informasi. UNESCO mempromosikan pertukaran pengetahuan dan aliran ide secara bebas untuk mempercepat pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang kehidupan satu sama lain. Program-program UNESCO turut berkontribusi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam Agenda 2030 oleh PBB pada tahun 2015 (UNESCO, 2023).

Pada awal tahun 1942, Ketika perang sedang berkecamuk, pemerintah negara-negara Eropa yang tengah berjuang melawan Nazi Jerman dan sekutunya, berkumpul di Inggris untuk menghadiri Konferensi Menteri Pendidikan Sekutu (CAME). Walaupun PD II masih berkecamuk, negara-negara tersebut mencari cara untuk membangun kembali system

Pendidikan mereka pasca perdamaian. Proyek ini dengan cepat mendapat dukungan dan mendapat karakter universal. Negara-negara baru, termasuk Amerika Serikat, juga bergabung dalam upaya ini. Berdasarkan saran dari CAME, Konferensi PBB untuk pembentukan organisasi Pendidikan dan kebudayaan (ECO/CONF) diadakan di London pada tanggal 1-6 November 1945. Meskipun perang baru saja berakhir, konferensi tersebut dimulai. Pada pertemuan ini, perwakilan dari 44 negara secepat untuk membentuk sebuah organisasi yang mempromosikan budaya perdamaian yang sejati. Visi mereka adalah membangun "solidaritas intelektual dan moral umat manusia" dengan harapan mencegah terjadinya Perang Dunia di masa mendatang.

Upaya pemerintah dalam mengatur politik dan ekonomi tidaklah cukup untuk memastikan dukungan masyarakat yang tulus dan berkelanjutan. Fondasi perdamaian harus diletakkan melalui dialog dan saling pengertian, serta dibangun atas solidaritas intelektual dan moral manusia. Dalam semangat ini, UNESCO mengembangkan alat Pendidikan untuk membantu masyarakat menjadi warga global yang bebas dari prasangka dan intoleransi. UNESCO bertekad untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk anak-anak, memiliki akses yang sama terhadap Pendidikan berkualitas. Dengan mempromosikan keberagaman budaya dan kesetaraan martabat antarbudaya, UNESCO memperkuat ikatan antar negara. UNESCO juga mendorong program dan kebijakan ilmiah sebagai platform untuk pembangunan dan kerjasama. Selain itu, UNESCO memperjuangkan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental dan syarat utama bagi demokrasi dan pembangunan. Sebagai wadah bagi gagasan-gagasan baru, UNESCO membantu negara-negara untuk mengadopsi standar internasional dan mengelola program-program yang mendorong pertukaran gagasan dan pengetahuan secara bebas.

Visi pendirian UNESCO muncul sebagai tanggapan terhadap Perang Dunia yang ditandai oleh kekerasan rasial dan anti-Semit. 70 tahun kemudian, setelah banyak perjuangan

pembebasan, peran UNESCO menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Keberagaman budaya sedang dihadapi dengan serangan, sementara bentuk-bentuk baru intoleransi, penolakan terhadap fakta ilmiah, dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi mengancam perdamaian dan HAM. Sebagai respons terhadap tantangan ini, misi UNESCO dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, dan Kebudayaan tetap teguh pada prinsip-prinsip humanisnya (UNESCO, 2023).

4.4 Struktur Organisasi UNESCO

Sekretariat UNESCO terdiri dari Direktur Jenderal UNESCO dan tim yang ditunjuknya. Hingga pertengahan tahun 2009, jumlah total staf Sekretariat mencapai 2.000 orang dari 170 negara berbeda. Staf tersebut dibagi menjadi kategori profesional dan layanan umum. Lebih dari 700 staf bekerja di kantor regional UNESCO yang tersebar di berbagai belahan dunia (Kemendikbud, 2019).

4.5 Indonesia Bergabung Ke UNESCO

Pada 25 Mei 1950, Indonesia resmi menjadi anggota UNESCO. Proses penerimaan ini dimulai dengan surat dari Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) yang mengajukan keanggotaan Indonesia ke UNESCO. Dokumen keputusan dari sidang *Executive Board* UNESCO dan Sidang Umum UNESCO kemudian membahas permohonan Indonesia tersebut. Sejak menjadi anggota, Indonesia berusaha aktif berpartisipasi dalam UNESCO sesuai dengan kepentingan dan tujuan nasionalnya. UNESCO, sebagai *specialized agency* PBB yang fokus pada Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan, dipandang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam upaya menciptakan perdamaian dunia dan memajukan kepentingan umum melalui pembangunan serta kerjasama dalam Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Kebudayaan, Komunikasi, dan Informasi.

Pada tanggal 25 Mei 1950, dalam sidang pleno *General Conference* UNESCO memutuskan untuk menerima RIS sebagai anggota UNESCO. Proses penerimaan tersebut

melibatkan beberapa tahapan, seperti: pengajuan aplikasi keanggotaan oleh pemerintah RIS, peninjauan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, hingga akhirnya diterimanya Indonesia sebagai anggota oleh *General Conference UNESCO* (KWRJU, Sejarah UNESCO, 2019).

¹ UNESCO *Courier*, majalah berita utama UNESCO melaporkan bahwa Dr. Darmasetiawan, yang merupakan wakil pribadi Perdana Menteri Indonesia, bertemu dengan M. Jaime Torres Bodet, Direktur UNESCO, untuk menyampaikan aplikasi keanggotaan Indonesia di UNESCO Pada tanggal 1 Februari 1950. Pada pertemuan tersebut, terungkap bahwa Pemerintah RIS memiliki keinginan untuk menggunakan metode terbaik dan terbaru dalam upaya pemberantasan buta huruf, serta keinginan untuk memanfaatkan hasil dari penelitian modern terhadap malaria dari laboratorium yang tersebar di Sri Lanka, Sidney, dan lokasi lainnya. Dr. Darmasetiawan Notohatmodjo, yang merupakan Menteri Kesehatan dalam Kabinet Sjahrir I, II, dan III, serta pemimin Persatuan Dokter Indonesia yang dibentuk pada tahun 1948, pada tahun 1950 menjabat sebagai "Pegawai Tinggi yang diperbantukan kepada Kementerian Luar Negeri dengan gelar pribadi Duta Besar," sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 148 Tahun 1951.

¹ Pertemuan tersebut merupakan langkah awal dalam proses menuju keanggotaan Republik Indonesia di UNESCO, yang melibatkan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Ekonomi selain ¹ *Executive Board* UNESCO. Dr. Darmawasetiawan membawa surat dari Perdana Menteri yang diberikan pada tanggal 8 Januari 1950, yang kemudian disampaikan oleh Direktur Jenderal UNESCO kepada Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 10 Januari 1950. Pengajuan ini bertujuan agar Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mempertimbangkan aplikasi tersebut, mengingat Indonesia Saat itu belum menjadi anggota PBB. Pada tanggal 18 Januari 1950, Direktur Jenderal UNESCO menerima juga surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yang pada saat itu dijabat oleh Abu Hanifah, kakak kandung Usmar Ismail, tertanggal 7 Januari 1950. Meskipun ada dua surat tersebut, Direktur Jenderal UNESCO

tidak menganggapnya sebagai masalah. Setelah menerima resolusi dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tanggal 8 Februari dan pada tanggal 17 Februari 1950, secara resmi disampaikan aplikasi Indonesia kepada *Executive Board UNESCO*. Pada akhir bulan Februari 1950, *Executive Board UNESCO* mengadakan pertemuan dan mengeluarkan keputusan di tanggal 2 Maret 1950 yang memenuhi permintaan Indonesia, serta juga Republik Korea dan Kerajaan Jordania yang telah melalui proses serupa. Keputusan dari *Executive Board UNESCO* menjadi dasar penerimaan keanggotaan oleh *Executive Board UNESCO* pada bulan Mei 1950.

Dari proses ini, dapat dilihat bahwa sejarah partisipasi RI di UNESCO dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, hubungan antara UNESCO dan PBB memiliki dampak signifikan; adanya perjanjian antara kedua organisasi yang mempengaruhi proses penerimaan anggota di UNESCO, dan juga mempengaruhi beberapa program yang ditawarkan oleh UNESCO kepada anggotanya. Kedua, perkembangan diplomasi RI memainkan peran penting dalam bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan, diplomasi tidak selalu dipimpin oleh ahli di bidang tersebut; ini merupakan perbedaan signifikan dengan kebijakan kepemimpinan awal UNESCO yang lebih menekankan pada kepakaran. Ketiga, posisi *Executive Board* di UNESCO menjadi penting; meskipun *General Conference* merupakan Lembaga tertinggi di UNESCO, *Executive Board* memiliki peran dalam menetapkan agenda pembahasan dan, oleh karena itu, proses penerimaan anggota serta penentuan program UNESCO (KWRIU, 1950).

Dalam buku referensi tentang sejarah UNESCO, Frederico Mayor, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal UNESCO pada saat itu, menyatakan bahwa "sejarah UNESCO bukanlah sekedar sejarah sebuah institusi, tetapi merupakan sejarah dari sebuah era, dan itulah mengapa sejarah negara-negara anggotanya terkait erat dengan sejarah organisasi ini". Ada perbedaan antara sejarah dunia internasional dan sejarah dunia; yang pertama berkaitan dengan hubungan antarnegara, sementara yang kedua mencakup fenomena yang melampaui batas-

batas negara, wilayah, atau budaya, seperti migrasi massal, perdagangan lintas benua, pertukaran teknologi antarbudaya, dan penyebaran gagasan lintas negara. Namun, jika melihat peran dari UNESCO, dapat dilihat bagaimana kedua definisi tersebut menyatu dalam penyebaran gagasan lintas negara yang didorong melalui hubungan antarnegara. Oleh karena itu, UNESCO menitikberatkan pada gagasan-gagasan yang tersebar di tingkat internasional. Salah satu gagasan utama yang dipromosikan oleh UNESCO adalah perdamaian, sesuai dengan yang tercantum dalam Konstitusi UNESCO tahun 1946. Pemerintah Negara Pihak Konstitusi ini atas nama rakyatnya menyatakan:

- Bahwa karena perang bermula dari pikiran manusia, maka perlindungan perdamaian juga harus dimulai dari pemikiran manusia;
- Ketidaktahuan akan cara hidup dan cara hidup satu sama lain telah menjadi penyebab umum, sepanjang sejarah umat manusia, timbulnya kecurigaan dan ketidakpercayaan di antara masyarakat di dunia yang sering kali menyebabkan perbedaan yang mengakibatkan perang;
- Perang besar yang telah berakhir terjadi karena penolakan terhadap prinsip-prinsip demokrasi tentang martabat, kesetaraan, dan saling menghormati antara manusia, serta karena penyebaran doktrin tersebut melalui ketidaktahuan dan prasangka mengenai ketidaksetaraan gender dan ras;
- Bahwa penyebaran kebudayaan secara luas dan pendidikan kemanusiaan yang menekankan keadilan, kebebasan, dan perdamaian sangat penting untuk menghormati martabat manusia dan merupakan tugas suci yang harus dilakukan oleh semua bangsa dengan semangat gotong royong dan kepedulian;
- Perdamaian yang hanya bergantung pada pengaturan politik dan ekonomi dari pemerintah tidak akan mendapatkan dukungan penuh, abadi, dan tulus dari masyarakat

dunia. Oleh karena itu, perdamaian harus didasarkan pada solidaritas intelektual dan moral seluruh umat manusia agar tidak gagal.

Rumusan ini menggambarkan bahwa gagasan perdamaian didukung oleh konsep hubungan antar bangsa, yaitu: prinsip-prinsip demokrasi seperti martabat, kesetaraan, kebudayaan dan Pendidikan, menghormati sesama manusia, serta solidaritas intelektual dan moral. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan UNESCO, terutama dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Pendidikan dan kebudayaan secara khusus disebutkan dalam konstitusi UNESCO 1946, sementara itu ilmu pengetahuan terkait erat dengan solidaritas intelektual dan moral. Komisi Internasional Kerjasama Intelektual, yang didirikan dibawah Liga Bangsa-Bangsa, memainkan peran penting dalam pembentukan landasan bagi program-program UNESCO, terutama dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.

Komisi ini dipimpin oleh Henri Bergson, seorang filsuf dari Prancis, didirikan berdasarkan keputusan Dewan Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Januari 1922. Selama 14 tahun, mulai dari 1926-1940, pendidikan menjadi perhatian sejak awal, karena di Perang Dunia I banyak menghancurkan sarana dan prasarana pembelajaran. Sampai tahun 1930, institute mengkaji dan menata ulang dokumentasi bahan ajar yang tersisa akibat PD I, kemudian institute membangun kembali hubungan antar bangsa dalam bidang pendidikan. Lalu, pada tahun 1936, institute mulai mempelajari bagaimana cara meningkatkan dan memperhatikan pendidikan untuk orang dewasa serta peran radio dan sinema dalam pendidikan pedesaan. Selain itu, komisi juga membentuk berbagai pusat dan komite kegiatan pendidikan serta memusatkan perhatian pada 14 topik yang kemudian menjadi dasar program UNESCO. Keempat belas topik tersebut adalah: Penyelenggaraan pendidikan menengah, Pendidikan bagi orang dewasa, Syarat penerimaan pendidikan tinggi, Penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pertukaran antar universitas (profesor, mahasiswa, *fellowship*), Sanatorium Internasional

Universal (tersedia terutama bagi mahasiswa tubercular), Pendidikan vokasi di Eropa, Penyetaraan jenjang keserjanaan dan diploma, Pengangguran lulusan universitas, Pers mahasiswa, Perpustakaan publik, (Sinema, radio, dan pers), Revisi buku teks geografi, dan sejarah. (Valderrama, 1995).

Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Alam berkembang dengan dinamis di dalam aktivitas Institut. Awalnya, seksi Informasi dan Hubungan Ilmu Pengetahuan mengintegrasikan berbagai cabang ilmu, termasuk moral, sejarah, filologi, dan ilmu pengetahuan alam. Di dalam sub-bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut diberi tugas untuk memperkuat hubungan internasional, membentuk federasi. Untuk tujuan ini, institute menyelenggarakan Konferensi Internasional Pendidikan Tinggi sebanyak 12 kali sejak tahun 1928. Di tahun yang sama, Institut menetapkan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai focus utama kegiatannya. Di sisi lain, dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Alam, Institut terlibat di berbagai kegiatan, termasuk mendukung penerbitan ilmiah di negeri-negara yang terkena dampak perang, menyebarluaskan hasil penelitian ilmiah, Menyusun bibliografi dalam bidang matematika, fisika, biologi, serta merumuskan standar nomenklatur ilmu pengetahuan. Pada tahun 1931, Institut membentuk *Scientific Advisory Committee* (Mayor & V. Iglesias, 1995).

Sejak awal berdirinya, Institut telah memfokuskan perhatiannya pada bidang Sinema, perpustakaan, dan arsip. Sinema dijadikan sebagai program yang mandiri dan bukan sekedar sebagai hiburan, melainkan sebagai alat Pendidikan di universitas dan sebagai subjek penelitian ilmiah. Pada tahun 1926, Institut menggelar Kongres Sinema pertamanya, yang dihadiri oleh 432 peserta dari 32 negara dan 12 asosiasi dunia. Pada tahun berikutnya, yaitu 1927, Institut Pendidikan Sinematografi Internasional didirikan di Roma, Italia. Selain itu, Institut juga melakukan serangkaian survei tentang perpustakaan, pustakawan, dan Pendidikan perpustakaan. Di bidang kearsipan, Institut membentuk *Committee of Archivist*, yang tugas utamanya adalah menerbitkan *International Guide to Archives*.

Seni dan sastra merupakan bidang kegiatan yang signifikan bagi Institut. Selama periode lima tahun, mulai dari tahun 1926-1931, Institut aktif dalam berbagai kegiatan yang berkontribusi pada pembentukan *Standing Committee on Letters and Arts* Liga Bangsa-Bangsa. Komite ini menjadi embrio dari Sektor Kebudayaan UNESCO dan mengadakan delapan pertemuan yang menghasilkan berbagai pernyataan penting. Pertemuan pertama diadakan di Frankfurt pada Maret 1932, diikuti oleh pertemuan kedua di Madrid pada Oktober 1932. Pada pertemuan di Madrid, sebuah prinsip dinyatakan bahwa “kebudayaan nasional suatu negara tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan kebudayaan nasional tetangga serta kebudayaan universal”, prinsip ini masih ditegaskan oleh UNESCO hingga saat ini. Selanjutnya, *Standing Committee on Letters and Arts* menggelar serangkaian pertemuan, dengan yang terakhir di Paris pada Juli 1937, yang menghasilkan pernyataan bahwa “sastra merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan masyarakat dan merupakan dan mengembangkan nilai-nilai yang memberikan makna dan dasar bagi tindakan manusia”.

Institut juga terlibat dalam berbagai kegiatan lainnya, termasuk evaluasi hak cipta dan property ilmiah. Sementara itu, Komisi juga terlibat dalam aktivitas lain, terutama dalam mendorong pembentukan komite kerjasama intelektual di tingkat nasional. Namun, secara umum, fokus utama kegiatan pendahulu UNESCO adalah pada bidang Pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Oleh karena itu, Ketika Menteri Pendidikan dari berbagai negara sekutu bertemu setelah PD II untuk membahas pembentukan UNESCO, proposal dari Amerika Serikat, yang tidak terkait dengan Komisi Internasional Kerjasama Intelektual, dengan mudah diterima.

Jika Komisi Internasional Kerjasama Intelektual dianggap sebagai pelopor dalam menetapkan fondasi bidang kegiatan UNESCO, maka demikian pula Konferensi Menteri Pendidikan Negara Sekutu (CAME) yang merumuskannya. Pertemuan ini digelar di London pada puncak PD II. Awalnya, pertemuan melibatkan Menteri Pendidikan atau perwakilan

mereka yang berada di London, termasuk Belgia, Cekoslovakia, Norwegia, Yunani, Belanda, Yugoslavia, dan Polandia, selain Inggris sendiri. Sesi pertama diadakan pada tanggal 16 November 1942, dan diperlukan empat sesi tambahan sebelum delegasi mengambil keputusan untuk mengundang delegasi Amerika Serikat pada akhir 1943.

Pada saat itu, Amerika Serikat sedang aktif dalam mendorong pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, konsep pembentukan sebuah Lembaga yang bertujuan untuk memajukan kerjasama intelektual di tingkat internasional juga dipertimbangkan secara serius dan memunculkan berbagai pendapat. Saat delegasi Amerika Serikat menghadiri Konferensi Menteri Pendidikan Negara Sekutu yang kelima di London, mereka mengusulkan nama *United Nations Educational and Cultural Reconstruction Organization*. Sementara itu, sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah membahas nama *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*, atau UNESCO. Nama terakhir ini kemudian digunakan dalam pembahasan oleh 43 negara yang berpartisipasi dalam konferensi kelima tersebut, dari Argentina sampai Yugoslavia, menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi para delegasi.

Delegasi dari berbagai negara berkumpul dalam konferensi di London pada tanggal 1-16 November 1945 dengan tujuan membentuk sebuah organisasi di bawah naungan PBB yang akan mengurus bidang Pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, yang dikenal sebagai UNESCO. Konferensi ini juga dihadiri oleh berbagai Lembaga seperti *International Labour Organisation*, sekretariat LBB, Komite Internasional Kerjasama Intelektual LBB, Institut Internasional Kerjasama Internasional, *Pan American Union*, *United Nations Relief and Rehabilitation Administration* (UNRRA), dan *International Bureau of Education*. Selain merumuskan draf Konstitusi UNESCO, konferensi ini juga mengidentifikasi dua bidang aktivitas utama UNESCO, yaitu *Programme Section* yang meliputi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Budaya dan Filsafat, Kesenian, Media

Massa, Perpustakaan, Kearsipan, dan Museum, serta Rekonstruksi dan Rehabilitasi. Di tanggal 16 November 1945, Konstitusi UNESCO ditandatangani oleh peserta konferensi CAME.

UNESCO secara resmi didirikan, namun belum memperoleh status sebagai Lembaga khusus PBB karena masih menunggu ratifikasi konstitusi oleh 20 negara. Francesco Valederrama, sejarawan UNESCO, menjelaskan bahwa tujuan pembentukan UNESCO adalah untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan melalui penerapan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, dan Kebudayaan dalam hubungan internasional, yang didasarkan pada kesejahteraan manusia dan saling pengertian. Maksud utama dari para pendiri adalah untuk menggalang kerjasama internasional dengan menyebarkan pengetahuan, membandingkan pengalaman, dan mendiskusikan gagasan, bekerjasama dengan LSM, Federasi LSM internasional yang melibatkan berbagai ahli, dan Asosiasi.

Bagi UNESCO, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, dan Kebudayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk melaksanakan tugas suci dan moral. Sasaran utamanya adalah perdamaian yang dibangun atas dasar solidaritas moral dan intelektual kemanusiaan. Dalam sidang *General Conference* UNESCO pertama pada tanggal 20 November sampai 10 Desember 1946 memutuskan bahwa terdapat dua jenis proyek utama dalam program UNESCO, yaitu dukungan untuk Pendidikan dasar yang dikaitkan dengan pemberantasan buta huruf, dan peninjauan mendalam terhadap materi pelajaran dengan tujuan untuk meningkatkannya.

Selain itu, pada *General Conference* yang pertama, keputusan diambil untuk menginisiasi berbagai proyek yang sejalan dengan agenda yang dibahas dalam konferensi CAME. Proyek-proyek tersebut meliputi bidang komunikasi, perpustakaan dan arsip, kesenian, serta ilmu pengetahuan alam dan social. Upaya juga dilakukan untuk menghapuskan hambatan dalam mengakses perpustakaan, museum, serta pertunjukkan seni dan sastra, dengan tujuan memastikan kebebasan interaksi manusia dan meningkatkan pemahaman antar sesama. Di

sector ilmu pengetahuan alam, upaya dilakukan untuk memajukan peralatan riset dan perlengkapan teknis, serta untuk mempromosikan pertukaran pengetahuan dan penyediaan beasiswa. Sementara di bidang ilmu pengetahuan social, berbagai proyek dijalankan dengan tujuan mendukung perdamaian.

Program tunggal ini masih mencerminkan area utama kegiatan UNESCO, yakni Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, dan Kebudayaan. Hal ini di putuskan pada program tahun 1947 yang menjadi tahun pertama dimana organisasi ini sepenuhnya merancang program-program sesuai dari keputusan *General Conference* dan seterusnya memperkuat pembagian bidang kegiatan UNESCO. Kejadiannya terbagi ke dalam rekonstruksi di bidang Ilmu Pengetahuan, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan, Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Lainnya, Kebudayaan, Perpustakaan, Ilmu Budaya, Filosofis, Seni, dan Sastra, serta Komunikasi Massa.

General Conference kedua, yang diadakan di Mexico City pada tanggal 6 November sampai 3 Desember 1947, menetapkan lima komponen utama dari kegiatan UNESCO, yaitu: Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Rekonstruksi, Komunikasi, Pertukaran Budaya dan Seni, serta Hubungan Sosial dan antar Manusia. *General Conference* tahun 1948, yang diselenggarakan di Beirut dari tanggal 17 November-11 Desember membahas dan menetapkan kegiatan utama UNESCO dalam bidang Rekonstruksi, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, Filsafat, Ilmu Budaya dan Kebudayaan. Kemudian, *General Conference* tahun 1949, yang berlangsung di Paris dari tanggal 19 September-5 Oktober, membahas dan menetapkan kegiatan utama UNESCO dalam bidang Rekonstruksi, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, Filsafat, Ilmu Budaya, Kebudayaan, serta Komunikasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembagian bidang kegiatan utama UNESCO telah mendapatkan formulasi yang relative tetap menjelang keanggotaan RI dalam Lembaga PBB.

Pada tahun 1950, Ketika RIS bergabung sebagai anggota UNESCO, program organisasi tersebut telah cukup stabil. Kegiatan berfokus pada Pendidikan, Ilmu Pengetahuan alam dan Sosial, serta Kebudayaan. Sementara itu, *General Conference* membahas bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan alam dan Sosial, Filsafat dan Ilmu Budaya, serta Kebudayaan. Selama dua tahun berikutnya (1951-1952) pembagian bidang aktivitas relative tetap dengan penambahan Komunikasi Massa. Oleh karena itu, sejarah partisipasi RI di UNESCO dapat ditelusuri melalui kegiatan di bidang-bidang tersebut. Meskipun ada usulan dari RI yang menghasilkan proyek, namun pelaksanaannya tidak mengubah kebijakan konservasi UNESCO. Dengan demikian, baik usulan maupun pelaksanaan proyek tersebut tidak mengubah arah kebijakan konservasi UNESCO (KWRIU, Sejarah UNESCO, 2019).

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan menjelaskan dimensi dan indikator dalam konsep yang ditemukan oleh John McDonald dan Louise Diamond (1996) yaitu *multi-track diplomacy*, yang mencakup sembilan track diplomasi. Namun penelitian ini hanya akan menggunakan menggunakan 2 Track, yaitu *track one Government* dan *Track two Non-government* untuk menganalisis diplomasi Indonesia dalam mempertahankan Batur Bali sebagai UGGp. Upaya bersama Pemerintah Indonesia dan Masyarakat di Batur Bali memiliki kepentingan yang selaras yaitu mendukung pemulihan dan pembangunan berkelanjutan serta membantu mengupayakan peningkatan dibidang sektor ekonomi.

5.1 Upaya Diplomasi Indonesia Dalam Mempertahankan Batur Bali

Adapun upaya yang dilakukan oleh diplomasi Indonesia dalam mempertahankan Batur Bali agar tetap menjadi UNESCO *Global Geoparks Network* dengan menjalankan beberapa rekomendasi dari UNESCO dari hasil revalidasi pertama dari UGGp Batur di tahun 2016. Dengan 11 rekomendasi pada revalidasi pertama, kemudian pemerintah dan masyarakat Bali menindak lanjuti rekomendasi tersebut untuk mencapai revalidasi kedua pada tahun 2022. Harusnya revalidasi kedua ini dilakukan di tahun 2020, akan tetapi terhambat karena COVID-19. Pertemuan UU untuk Program Geosains dan Geopark Internasional (IGGP) direncanakan berlangsung selama epidemi dan telah ditunda hingga akhir tahun 2020, dan pertemuan informasi persiapan diadakan secara online. Dewan Geopark Global UNESCO merencanakan pertemuan Dewan Koordinasi Internasional MAB (ICC-MAB) pada pertengahan Desember, tergantung pada evaluasi permohonan dan validasi baru. Pada 16 Maaret 2020 UNESCO berhasil menyelesaikan pertemuan Internasioanl Geoscience Council melalui konferensi video (UNESCO, 2020).

5.1.1 Track One (Government)

Peran pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam mengelola tata kelola suatu negara. Tujuannya adalah untuk menciptakan kedamaian dan keadilan sosial kepada seluruh penduduk di seluruh negara (Diamond & McDonald, 1996). Upaya pemerintah Indonesia untuk mempertahankan agar Batur Bali tetap sebagai UGGp melalui revalidasi kedua tahun 2022 dengan melakukan pertemuan secara virtual ditanggal 7-9 Desember. Bupati bertindak sebagai penanggung jawab Dewan Pertimbangan dan Komite Koordinasi, pengelolaan *Geoparks* Batur dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 660/124/2011. Komite Koordinasi terdiri dari Koordinator dan Wakil Koordinator. Sejak tahun 2011 hingga saat ini, Koordinator UGGp Batur disebut *General Manager* dan Wakil Koordinator masih dijabat oleh orang yang sama. Koordinator *Geoparks* merangkap Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli. Struktur organisasi *geopark* juga dilengkapi dengan 4 komite teknis (Komite Ilmiah, Komite Pengembangan, Komite Promosi, Komite Konservasi); termasuk para ahli (*geoscientist*). Dengan berkembangnya pariwisata di kawasan UGGp Batur, Bupati mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang pembentukan Badan Pengelola Pariwisata *Global Geoparks* Batur UNESCO. Wilayah kerjanya meliputi Kintamani yang termasuk dalam kawasan *geoparks*. Badan Pengelola yang bertugas menyelenggarakan pariwisata khususnya di kawasan *geoparks* bersinergi dengan pengelola *geoparks* Batur. Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 800.05/759/2018 mengangkat Direktur, Wakil Direktur, Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Departemen sejalan dengan program SDG's terkait kesetaraan gender, sekitar 15% staf di *geoparks* dipegang oleh perempuan (Giri Putra & Suyasa, 2012).

Kegiatan edukasi di kawasan UGGp Batur dilaksanakan secara berkala dan telah berjalan dengan baik sejak tahun 2012 melalui program "*Geopark to School*" dan

"*School to Geopark*". Pemahaman konsep *geoparks*, warisan geologi, warisan alam, warisan budaya, serta warisan takbenda dilakukan melalui program "muatan lokal" di seluruh sekolah yang berada dalam kawasan *geoparks*. Program ini diluncurkan oleh Bupati Bangli. Kedepannya akan dilaksanakan program "*Geopark Corner*" yang materinya disesuaikan dengan jenjang sekolah (SD, SMP, SMA). Program ini dikelola oleh siswa di masing-masing sekolah. Pengelola *geoparks* hanya berperan sebagai fasilitator dan dinamisator. Kegiatan sosialisasi ini bermitra dengan sekolah-sekolah yang berada di dalam kawasan Batur yang dilakukan pada tahun 2012-2016, hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kegiatan ini. Dampak tersebut terlihat dari banyaknya siswa taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas yang mengunjungi Museum *Geoparks* Batur. Biasanya mereka melakukan kunjungan lapangan ke museum dan beberapa geosite di akhir semester sekolah. UGGP Batur juga memfasilitasi camping ground bagi mereka.

Saat ini pengelola *geoparks* merencanakan program pendidikan dasar yang berkaitan dengan alam, budaya, warisan non budaya, sumber daya air, perubahan iklim, dan bencana geologi. Program ini akan melibatkan perguruan tinggi di Bali, Ikatan Ahli Geologi Indonesia Provinsi Bali, serta instansi pemerintah pusat terkait. Melalui keputusan Bupati, muatan lokal tentang *geoparks* yang dilaksanakan di beberapa sekolah sejak tahun 2015 terus dipertahankan dan dikembangkan.

Pada saat rekomendasi *green card* dikeluarkan oleh UNESCO *Global Geoparks Division of Ecological and Earth Sciences* tanggal 16 januari 2016 di revalidasi pertama. Satu tahun setelahnya pemerintah Indonesia mulai melakukan hal-hal yang menjadi perhatian bagi UNESCO untuk *geoparks* Batur. Kemudian 11 rekomendasi yang keluar dari UNESCO, menjadi upaya pemerintah untuk bisa mencapai status

UGGp kembali. 11 rekomendasi dari UNESCO sebagai berikut (Giri Putra & Suyasa, 2012);

1) Pelatihan dan Pendidikan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 mengamanatkan untuk melakukan pembentukan Komite Nasional *Geoparks* Indonesia (KNGI) sebagai penyempurnaan kerangka kelembagaan di pusat. Susunan organisasi KNGI di daerah dibentuk oleh Badan Pengelola *Geoparks* yang membantu KNGI adalah Menteri/kepala Lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wakil kota dalam melakukan pelatihan dan Pendidikan pengembangan *geoparks*. Pelatihan dan Pendidikan adalah bentuk komitmen pemerintah dalam pengembangan *geoparks*, bentuk dari pelaksanaan ini berbasis sosialisasi, pelatihan, promosi, dan penguatan jejaring *geoparks*. Dalam mendorong pengembangan *geoparks*, pemerintah daerah kabupaten atau kota menetapkan pengelola *geoparks* kepada bupati/wakil kota setempat (Lestari, Forina; Indrayati, Ira, 2022).

Pemerintah mempekerjakan pemandu lokal dengan melakukan pelatihan dan pendidikan tambahan yang bertujuan untuk dapat mengembangkan pengetahuan serta keterampilan pemandu dalam menafsirkan lanskap dan berbagai komponen yang berbentuk *geoparks* kepada para wisatawan, sehingga para pekerja dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan mengenai Batur Bali kepada pengunjung/wisatawan. Kegiatan pelatihan dan pendidikan ini dapat dikembangkan sebagai diploma *geoparks* tertentu dan dapat ditawarkan dalam bahasa Inggris jika diperlukan. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat lokal dan komunitas pecinta alam setempat dalam rangka gerakan sadar wisata di destinasi pariwisata pada tanggal 26-27 November 2019.

2) Penguatan Jejaring Kemitraan

Pada tanggal 15 Agustus 2019 Bupati Bangli melakukan pertemuan kegiatan penguatan jejaring kemitraan dalam rangka pengembangan *geoparks* bersama para mitra untuk memasukkan metodologi yang *coherence* mengenai kriteria yang diperlukan untuk menjadi mitra dan perjanjian formal dengan *geoparks*. Hal ini berlaku namun tidak terbatas pada penyedia akomodasi dan catering, penyedia transportasi, penyedia kegiatan, dan produsen produk lokal yang diterapkan dalam kesepakatan tetapi juga mencakup pedagang kaki lima, produsen cinderamata, dan komunitas pecinta alam.

Kemitraan berkaitan dengan kolaborasi dalam pengembangan *geoparks*, sehingga menjadi bagian yang sangat penting, oleh sebab itu dengan melalui kolaborasi para pemangku kepentingan dapat dapat duduk bersama untuk membangun komitmen bersama sehingga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam kelangsungan pembangunan wilayah (Bakti, Sumartias, Damayanti, & Nugraha, 2018).

Melalui paradigma pembangunan inklusif maka dapat mendorong tercapainya berbagai bentuk kerja sama dalam proses pembangunan dengan melalui upaya peelibatan masyarakat seutuhnya, dimana masyarakat lokal memiliki, mengelola dan mengendalikan secara substansial kegiatan pariwisata dan proporsi keuntungan yang besar tetap berada di masyarakat (canesin, Martinez, & Brilha, 2020).

3) Logo

Branding adalah alat strategi pemasaran efektif yang sering digunakan dan berhasil digunakan pada masa lalu (Rooney, 1995). Pencitraan merek destinasi dianggap sebagai salah satu strategi paling penting dan efektif dalam wilayah pemasaran destinasi pariwisata. Upaya branding dan promosi juga dilakukan oleh pemerintah mencantumkan logo atau merek pada produk-produk *geoparks* perlu dikembangkan, sehingga dapat memberikan nilai tambahan dan visibilitas yang lebih besar untuk *geoparks* secara keseluruhan.

Anholt, menyatakan bahwa branding adalah cara untuk membentuk persepsi terhadap suatu target kelompok masyarakat tertentu dengan melalui 6 aspek yakni: Pariwisata, masyarakat, pemerintah, kebudayaan dan warisan budaya, ekspor, serta investasi dan imigrasi. Potensi ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan pembangunan berkelanjutan di bidang destinasi pariwisata (Anholt, 2008).

Logo *geoparks* Batur perlu ditampilkan lebih banyak pada produk *geoparks* seperti biji kopi giling Kintamani, jeruk Kintamani, hasil dari olahan petani, serta berbagai jenis kerajinan tangan. Mengenai logo *geoparks* Batur, nama tempat merupakan ciri penting dari identitas nasional dan teritorial. Selain itu, kata-kata yang digunakan sebagai nama tempat mempunyai peranan yang penting dalam tingkat regional maupun nasional, nama tersebut dapat menimbulkan perasaan yang kuat di kalangan masyarakat luas, terutama di daerah multietnik terhadap nama tempat yang mempunyai hubungan erat dengan tempat tersebut.

4) Pengembangan Kualitas Pendakian

Inovasi dalam pengembangan baik itu geoproduct maupun geoservis harus terus di dorong, termasuk kolaborasi dengan kawasan sekitar. Dari pemasukan melalui geoproduct dan geoservis ini merupakan penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam dan hasil pengelolannya yang termasuk dalam PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dimana pendapatan dikumpulkan melalui penjualan tiket masuk kawasan kemudian dengan hasil pendapatan tersebut pemerintah dapat melihat dan menilai untuk pengembangan kualitas pendakian berkelanjutan (Lestari, Forina; Indrayati, Ira, 2022).

Mengembangkan kualitas pendakian Gunung Batur dengan melalui review dan pembaharuan SOP, baik mengenai prosedur keselamatan dan keamanan serta informasi geografis yang disampaikan oleh pemandu trekking. Produk trekking yang ditawarkan oleh Geoparks harus dikembangkan dan di promosikan dengan lebih baik dan harus mencakup kriteria yang jelas mengenai kualitas, keamanan dan pelatihan pemandu. Selain itu, penelitian daya dukung dilakukan untuk menentukan jumlah trekker yang diperbolehkan pada waktu tertentu untuk melestarikan kawasan dan memberikan suasana terbaik bagi mereka. Dilakukannya pemisahan jalur pendakian adalah untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kepadatan pendaki disuatu titik fokus, maka dilakukannya pemisahan jalur pendakian menjadi jalur pemula, jalur pengalaman, dan jalur lanjutan.

5) Pengembangan Rute

Pada pengembangan rute Danau Batur penting untuk melakukan diversifikasi produk *geoparks* yang ditawarkan, sehingga rute Danau Batur harus

dikembangkan yang mencakup tur perahu singkat ke danau dan interpretasi panorama beberapa situs utama. Rute Danau Batur, panel interpretasi, dan pengembangan fasilitas yang sedang dalam proses pembaharuan.

Dengan melakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) dalam penyediaan infrastruktur diharapkan agar dapat menjadi alternatif sumber pendanaan bagi daerah selain dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu penting bagi pemerintah dalam memetakan potensi kerja sama dengan pihak swasta dalam pengembangan kawasan wisata di lokasi *geoparks* mengingat potensi geowisata yang dapat dikembangkan cukup tinggi (Koh, Oh, Youn, & Kim, 2014).

6) Peningkatan Visibilitas *Geoparks*

Visibilitas *geoparks* harus ditingkatkan dengan penggunaan logo *geoparks* dan merek secara konsisten di semua tempat, serta branding yang konsisten termasuk perbaikan situs jaringan *geoparks*, petunjuk arah, melakukan promosi di bandara dan menekankan hubungan antara geologi dan aspek warisan budaya lainnya. Peningkatan visibilitas *geoparks* dilakukan melalui konsistensi penggunaan logo *geoparks* Batur pada setiap program dan kegiatan pemilihan ruang publik, pembaruan panel interpretasi, rambu-rambu lalu lintas, serta panel informasi di bandara Internasional Bali.

Memastikan untuk mendorong Badan Pengelola *Geoparks* agar lebih mampu untuk dapat menjalankan pengelolaan yang mandiri, profesional dan berkelanjutan dengan memegang tiga pilar yaitu: konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Badan Pengelola *geoparks* harus terus

melakukan pembinaan kepada pengelola *geosite* (situs geografis) untuk menerapkan SOP dan standar-standar pengelolaan berkelas internasional (Lestari & Indrayati, 2022).

7) Batasan *Geoparks*

Dalam pengembangan *geoparks* potensi situs geografis merupakan aset yang bernilai apabila dikembangkan dengan tepat dan berkelanjutan. Manajemen aset situs geografis merupakan salah satu sumber alternatif pembiayaan melalui pemetaan aset (lokasi dan kondisi) yang dimiliki beserta kewajibannya (*monitoring*, *operating*, dan *maintaining*) hingga strategi pemanfaatan aset. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penerimaan, pengadaan, penganggaran, penggunaan, penyimpanan dan penyaluran, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penatausahaan, penghapusan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi, dan pemindahtanganan. Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah (Lestari, Forina; Indrayati, Ira, 2022).

Maka dari itu, Batur Bali memperjelas batasan *geoparks* berdasarkan geomorfologi yang sesuai dengan budaya. kawasan *geoparks* seluas 366,4 km persegi ini mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kintamani. Lingkar Kaldera Batur yang luasnya sekitar 110,5 km persegi dan menjadi lokasi seluruh *geosite* sering diartikan sebagai batas *geoparks*. Batas definitif UGGp Batur yang menggunakan batas administrasi kabupaten telah ditampilkan pada panel peta baru. Kedepannya akan ditambahkan situs geologi, biologi,

dan budaya baru (tangible dan intangible) ke dalam *geoparks* yang mempunyai luas 366,4 km persegi.

8) Aturan Pengunjung

Hal-hal yang harus diperhatikan kepada pengunjung adalah memberikan klarifikasi mengenai dampak pariwisata terhadap situs Pemakaman Trunyan dan rasa hormat yang harus ditunjukkan dari pengunjung. Papan larangan telah dipasang, serta sosialisasi kepada masyarakat setempat. Pagar tanaman ditanam untuk memisahkan lokasi secara visual dan sebagai tanda penghormatan terhadap pengunjung yang tidak masuk tanpa izin ke sisi suci.

Para wisatawan harus menghormati hukum lokal dan nasional yang berkaitan dengan perlindungan warisan geologi. Situs warisan geologi tertentu dalam UGGP harus dilindungi secara hukum (Wiramatika, Sunarta, & Ancom, 2021).

9) Penebangan Liar

Selama revalidasi kedua tahun 2017-2019, penebangan liar telah berkurang secara signifikan dengan konversi beberapa lokasi menjadi lokasi wisata, khususnya di kawasan konservasi. Upaya pemberantasan penebangan liar dikawasan *geoparks* telah dilakukan dari waktu ke waktu.

10) Memperkuat Jaringan *Geoparks*

Jaringan dan representasi geografis yang seimbang di seluruh Negara Anggota merupakan prinsip dasar *Global Geoparks*. Kuatnya peran jaringan dalam keberhasilan *Global Geoparks* dalam memfasilitasi pertukaran pengalaman, pembentukan inisiatif dan proyek bersama serta peran yang

sangat penting yang dimainkan dalam peningkatan kapasitas, UNESCO melalui IGGP-nya akan mendorong penguatan jaringan regional dan UGGp. Melalui kerja sama dengan berbagai jaringan IGGP dapat memenuhi perannya dalam peningkatan kapasitas di tingkat regional dan nasional untuk UGGp, calon *geoparks*, dan negara-negara anggota lain yang tertarik.

UGGp Batur telah terlibat aktif dalam memperkuat jaringan *geoparks* di tingkat nasional (Indonesia *Geoparks Network*), dan berkontribusi pada konferensi dan pertemuan regional mengenai *Geoparks* Global UNESCO. Serta memperkuat jejaring dengan UGGp lainnya ditingkat regional, nasional, dan global, serta berkontribusi aktif dalam konferensi dan pertemuan internasional mengenai UNESCO *Global Geoparks*.

Selain itu, IGGP akan memainkan peran aktif dalam membina kemitraan dan berbagai praktik terbaik antara UGGp yang sudah ada dan calon *Geoparks*, sehingga jika memungkinkan membantu mendanai pertukaran keahlian di antara mereka. IGGP akan menyelidiki pembuatan alat berbasis web untuk mendokumentasikan dan bertukar informasi pengalaman dan praktik terbaik komunitas Global *geoparks* (UNESCO, Batur UNESCO Global Geopark).

11) Memperkuat Peran Perempuan

Memperkuat peran perempuan dalam posisi manajemen senior di staf *geoparks*, sesuai dengan prinsip UNESCO. Jumlah staf dan petugas perempuan dalam pengelolaan UGGp Batur ditingkatkan menjadi 14% (14 orang dari 97 personil). Jumlah tersebut belum termasuk mayoritas perempuan yang terlibat dalam beberapa acara budaya dan kegiatan pedagang.

5.1.2 Track Two (Non-Government)

Dalam mewujudkan tata kelola *geoparks* yang profesional tentu perlu persiapan yang matang melalui kajian dan kesepakatan serta evaluasi secara berkelanjutan dan konsisten dalam memastikan proses berjalan dengan optimal, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul kedepannya. Terdapat 4 pengelolaan yang tepat yaitu: 1. Dikelola dalam struktur organisasi yang telah ada seperti Badan Pengelolaan Taman Nasional, 2. Dikelola oleh pemerintah daerah misalnya Bappeda atau Dinas Pariwisata, 3. Dikelola oleh pihak ketiga baik di bawah pemerintah maupun non-pemerintah (dalam artian berbasis komunitas di RI), 4. Dikelola bersama baik itu pemerintah atau non-pemerintah ataupun masyarakat dan pihak swasta, tetapi tetap di bawah pengawasan pemerintah (Management, 2020).

Dalam pariwisata berkelanjutan isu-isu yang terkait adalah masyarakat adat, ekowisata, warisan budaya dan alam, taman alam, satwa liar, dampak lingkungan, dan pembangunan perdesaan maupun perkotaan. Harus dipahami bahwa pembangunan berkelanjutan pariwisata adalah proses yang berkesinambungan dengan peningkatan dan perbaikan, proses yang berkaitan ini menjadi cara untuk mendapatkan manfaat tanpa mengorbankan lingkungan dengan melalui bantuan masyarakat setempat dan menunjukkan bahwa pariwisata adalah salah satu cara untuk dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat dan membuat peningkatan bagi lingkungan (Syahrjati, 2018).

Partisipasi masyarakat dalam tahap pengembangan pariwisata dapat menentukan suatu keberhasilan dari destinasi pariwisata (Pitana, 1999). Dengan bantuan masyarakat proses yang berkesinambungan menjadi cara untuk mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan

pariwisata tidak dapat diabaikan karena sangat penting dalam menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan penggunaan sumber daya di daerah tujuan wisata.

Kemitraan dengan masyarakat paling banyak dilakukan dengan Pokdarwis, Karang Taruna dan Koperasi dengan kegiatan seperti UMKM. Terlepas dari kontribusi ekonomi masyarakat lokal yang dapat diperoleh dari pariwisata, keterlibatan masyarakat juga berguna bagi pengembangan pariwisata karena dapat menciptakan manajemen lingkungan yang efektif berdasarkan pengetahuan tradisional, lokal, dan ilmiah, pengembangan ekonomi, pemberdayaan sosial, budaya perlindungan warisan dan penciptaan pengalaman interpretative dan alam berbasis wisata dan belajar mengapresiasi lintas dan budaya (Syahrjati, 2018).

Sebelum dilakukannya implementasi, perencanaan merupakan hal utama yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder. Melihat kondisi tersebut sebelum dan sesudah ditetapkannya Batur *Global Geoparks Network* yang tidak adanya perubahan taraf hidup masyarakat lokal setempat, maka diperlukannya pengembangan Kawasan wisata geopark Batur secara berkelanjutan yang mengacu pada peran serta masyarakat lokal.

Keberhasilan *geoparks* bergantung pada manfaat dan partisipasi masyarakat lokal dalam membangun keharmonisan antara manusia dan alam. Keterlibatan langsung masyarakat lokal mengarah pada pemberdayaan lokal yang memungkinkan kebebasan berekspresi kearifan lokal tradisional yang memperkuat identitas lokal dan perlindungan budaya. Lebih lanjut, *geoparks* menekankan inklusivitas, terutama melalui keterlibatan masyarakat lokal dalam upaya konservasi yang melibatkan kepemilikan sumber daya dan lokasi yang berkontribusi positif terhadap penghidupan dan kualitas hidup. UGGP harus secara holistik mengintegrasikan inisiatif konservasi

yang mempertimbangkan pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, penyediaan infrastruktur dan pembangunan sosial-ekonomi lokal, serta kesejahteraan (Rosidie, 2018).

Setelah melalui tahapan revalidasi pertama, dan menghasilkan 11 rekomendasi dari UNESCO, UGGp memberdayakan masyarakat dan memberi kesempatan untuk mengembangkan kemitraan yang kohesif dengan tujuan yang sama. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan masyarakat adat. Sehingga, memerlukan komitmen yang kuat dari masyarakat lokal untuk mendukung dan mengembangkan Geopark Global UNESCO (UNESCO).

Upaya masyarakat untuk mempertahankan Batur Bali dengan melalui beberapa peran yaitu:

- **Peran Pariwisata Berbasis Masyarakat Sebagai Solusi**

Peran pariwisata berbasis masyarakat merupakan sebuah pendekatan manajemen pariwisata yang di kelola oleh masyarakat lokal dengan tujuan untuk mengurangi dampak negative pariwisata terhadap lingkungan dan budaya, sehingga dapat menciptakan dampak ekonomi yang positif. Masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi wisata menjadi bagian integral dari destinasi itu sendiri. Gagasan ini menyatakan bahwa manajemen pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat lokal baik yang bersangkutan secara langsung maupun yang tidak termasuk dalam semua aspek manajemen, termasuk perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pariwisata, seperti penyediaan produk dan layanan yang dibutuhkan oleh wisatawan (Ermawati, 2010).

Peran pariwisata berbasis masyarakat adalah pendekatan dalam pengembangan pariwisata yang dimana penekanannya adalah masyarakat

setempat baik yang terlibat secara langsung maupun tidak, dalam bentuk memberikan akses serta kesempatan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang berdampak positif dalam pemberdayaan politik melalui kehidupan demokrasi, termasuk pembagian keuntungan dari kegiatan pariwisata lebih adil bagi masyarakat setempat. Peran pariwisata berbasis masyarakat ini adalah masyarakat sebagai pariwisata yang memperhitungkan berbagai aspek kelestarian lingkungan, social dan budaya. Dengan kata lain peran masyarakat sebagai pariwisata adalah suatu komunitas instrument pembangunan dan konservasi lingkungan atau alat untuk mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan (Muafi, Sugandini, & Susilowati, 2018).

Kehendak masyarakat untuk terlibat dalam pariwisata merupakan dasar yang kuat terhadap keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat di setiap tahap pengembangan pariwisata dapat dikatakan sebagai syarat utama keberhasilan destinasi tersebut.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di Batur Bali adalah dengan menjadikan masyarakat sebagai alat atau model manajemen pariwisata untuk mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan dan dapat menciptakan dampak ekonomi yang positif. Hal ini termasuk dalam keseluruhan tahapan manajemen pengelolaan dan perencanaan serta evaluasi pariwisata, seperti persiapan dari keseluruhan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan (Syahrijati P. S., 2018).

Pada tahun 2018 setelah satu tahun ditetapkannya revalidasi kedua berikut kondisi perkembangan ekonomi lokal Batur Bali:

1. Semakin banyak pembangunan hotel, restoran, akomodasi khususnya di sekitar Penelokan dan lainnya.

2. Beberapa objek wisata di kawasan Geopark Batur, termasuk sumber air panas yang dikelola setiap hari oleh masyarakat desa adat. Pendapatan dari pengelolaan wisata digunakan untuk kepentingan bersama.
3. Sebagian besar hotel, sumber air panas di kawasan Geopark Batur dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan lokal, dan mempekerjakan masyarakat lokal.
4. Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di sekitar Penelokan dan beberapa tempat wisata (Sagala, Rosyidie, Sasongko, & Syahbid, 2018).

- **Peran Perusahaan Dalam Pariwisata Berbasis Masyarakat**

Setiap perusahaan pada dasarnya berorientasi pada keuntungan, baik keuntungan jangka panjang maupun jangka pendek. Akan tetapi dalam peran perusahaan berbasis masyarakat adalah suatu polemik dimana perusahaan membutuhkan profit masyarakat untuk kegiatan operasional serta keuntungan bagi pemilik. Sebuah perusahaan sosial (*social enterprise*) adalah bisnis sosial yang didirikan untuk memasik kesempatan kerja nyata bagi penduduk lokal dengan target yang diprioritaskan.

Geoparks Batur sedang berupaya untuk mengembangkan strategi kemitraan yang lebih terstruktur dengan mitra-mitra melalui penetapan kriteria yang diperlukam untuk menjadi mitra serta penandatanganan perjanjian resmi dengan *geoparks*. Langkah ini tidak hanya berlaku untuk penyedia layanan akomodasi dan catering, penyedia jasa transportasi, kegiatan, dan produsen produk lokal penyedia jasa, tetapi juga untuk berbagai jenis perusahaan social-ekonomi. Karena, dalam konteks ini perusahaan sosial-ekonomi, yang memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan

barang atau layanan yang dapat mengisi kekosongan pasar, harus dimasukkan ke dalam salah satu definisi karakteristik.

Maksud peran perusahaan berbasis masyarakat disini ialah, fokus pada restoran, hotel, maupun perusahaan yang ada di Batur Bali adalah untuk mencari karyawan lokal khususnya masyarakat kintamani. Yang mana nantinya dengan membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat kintamani dapat meningkatkan kualitas masyarakat lokal (Syahrijati P. S., 2018).

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Diplomasi Menurut Djelantik (2008), adalah manajemen hubungan internasional baik antar negara maupun antar aktor-aktor internasional. Dengan melalui negara sebagai perwakilan resmi, aktor berperan untuk menyampaikan dan mengkoordinasi cara pandang terkait negaranya, serta aktor dapat berperan untuk melobi antar kesepakatan yang ingin dicapai. Diplomasi adalah ide tentang strategi politik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuan dan melindungi kepentingan mereka melalui proses negosiasi, tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, atau tindakan yang melanggar hukum (Berridge, 2015). Atas kerja sama diplomasi Indonesia dengan UNESCO berbasis *Global Geoparks Network* (UGGp) dan dengan dukungan dan campur tangan UNESCO yang menjadi wadah untuk Batur Bali lebih dikenal oleh dunia.

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada upaya diplomasi Indonesia dalam mempertahankan Batur Bali Sebagai *Global Geoparks Network* (UGGp). Penelitian ini menggunakan konsep multi-track diplomasi oleh Louise Diamond dan John McDonald yang mencakup Sembilan track diplomasi, akan tetapi penulis hanya memusatkan perhatian pada dua track yaitu: *Track One Government* (Bupati Bangli dan pemangku kepentingan) dan *Track Two Non-Government* (masyarakat). Upaya dari pemerintah dan masyarakat bertujuan untuk mendukung perkembangan dan pembangunan berkelanjutan yang berbasis masyarakat dan pemerintah dalam mempertahankan Batur Bali sebagai UGGp.

Pemerintah kota dan masyarakat setempat melakukan upaya-upaya yang dapat mempertahankan serta membangun citra baik melalui diplomasi pariwisata. Maka, UGGp sebagai faktor pendorong untuk dapat melakukan perkembangan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia agar dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat

lokal Kabupaten Bangli, Kecamatan Kintamani. Pada tahun 2012 Batur Bali menjadi *Global Geoparks* pertama di Indonesia, sehingga menjadi perhatian bagi Kabupaten Bangli untuk mempertahankan Batur Bali sebagai UGGp. Setelah Batur Bali di akui dan ditetapkan sebagai UGGp oleh UNESCO pada tahun 2012 kemudian setahun setelah dilakukannya revalidasi pertama, UNESCO mengeluarkan 11 rekomendasi yang menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat lokal untuk dapat melakukan perkembangan dan pembangunan berkelanjutan agar dapat mempertahankan Batur Bali di revalidasi kedua supaya tetap menjadi UGGp. Pada revalidasi kedua tahun 2022 yang harusnya dilaksanakan pada tahun 2020, Batur Bali dianggap telah memenuhi syarat oleh UNESCO karena banyak perkembangan yang timbul setelah 11 rekomendasi dari UNESCO keluar. Upaya dari pemerintah dan masyarakat Kintamani membuahkan hasil untuk dapat menjaga Batur Bali agar tetap menjadi UGGp, sehingga Batur Bali telah menerima lampu hijau untuk melanjutkan revalidasi ke tiga nantinya.

6.2 Saran

Pada penelitian ini penulis telah menelaah bagaimana jalannya diplomasi Indonesia dalam mempertahankan Batur Bali sebagai Global Geoparks Network (UGGp) melalui revalidasi kedua. Peneliti menyarankan agar kedepannya pemerintah dan masyarakat Kintamani Kabupaten Bangli harus lebih peka akan perkembangan untuk menjadikan Batur Bali lebih maju, sehingga akan berdampak dengan prospek ekonomi untuk Kintamani dan juga masyarakat lokal. Bukan hanya dari masyarakat yang di tuntut penuh untuk menjaga Kawasan Batur akan tetapi pemerintah juga dituntut untuk memberikan pengarah dan edukasi yang lebih kepada masyarakat, dan para wisatawan.

Kemudian penulis mengnajukan agar baik pemerintah maupun non-pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk menerapkan berbagai inisiatif yang telah di rancang, termasuk program-program untuk memperkuat pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan begitu, penerapan Bali *Guidelines* dapat membantu dalam pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Upaya Diplomasi Indonesia Dalam Mempertahankan Batur Bali sebagai Global Geoparks Network (UGGp)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | kwriu.kemdikbud.go.id Internet Source | 8% |
| 2 | ojs.unud.ac.id Internet Source | 3% |
| 3 | journal.ipb.ac.id Internet Source | 3% |
| 4 | ppsdma-bpsdm.esdm.go.id Internet Source | 2% |
| 5 | journalarticle.ukm.my Internet Source | 2% |
| 6 | made-blog.com Internet Source | 1% |
| 7 | kabar24.bisnis.com Internet Source | 1% |

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

SURAT KETERANGAN PENGECEKAN SIMILARITY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Anita Pebby Kesuma
Nim : 07041382025181
Prodi : Ilmu Hubungan Internasional

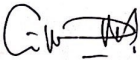
Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi/Tesis/Disertasi/Lap.
Penelitian yang berjudul Upaya Diplomasi Indonesia Dalam Mempertahankan Batur Bali Sebagai
UNESCO *Global Geoparks Network* (UGGp) adalah 20%.

Dicek oleh operator *: 1. Dosen Pembimbing

2. UPT Perpustakaan

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggung
jawabkan.

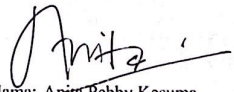
Menyetujui
Dosen pembimbing,



Nama: Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A
NIP: 198405182018031001

Indralaya, 20 Mei 2024

Yang menyatakan,



Nama: Anita Pebby Kesuma
NIM: 07041382025181

*Lingkari salah satu jawaban, tempat anda melakukan pengecekan Similarity